



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026.

Bali, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali



[Redacted Signature]
[Redacted Name]
In Arya Dhyana Kubontubuh, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
[Redacted Address]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	40
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	45
3.3. Program dan Kegiatan	45
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	48
Bab V Penutup.....	49
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2.	Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3.	Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan-jabatan Struktural
Tabel 2.4.	Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Tabel 2.5.	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023
Tabel 2.7.	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 2.8	Review terhadap RKPD Provinsi Bali Tahun 2025
Tabel 2.9	Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 2.10	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA
Tabel 2.11	Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2023
Tabel 2.12	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 2.13	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tabel 2.14	Realisasi Anggaran Tahun 2023
Tabel 2.15	Usulan Program/Kegiatan Tahun 2025 dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Bali
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025
Tabel 4.1	Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Penentuan Pagu Anggaran

BAB I PENDAHULUAN

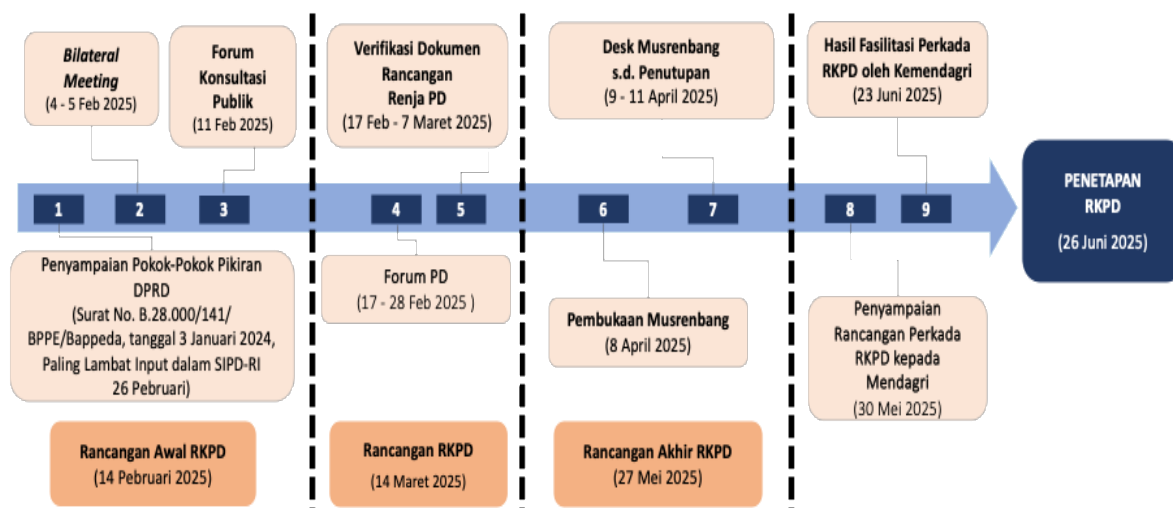
1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencananan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pada Tanggal 27 November Tahun 2024, seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Bali serta kabupaten dan kota di dalamnya telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Pilkada serentak ini bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk periode jabatan Tahun 2025-2029. Pada Bulan Februari Tahun 2025, Provinsi Bali secara resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode jabatan Tahun 2025-2029, dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur terpilih memiliki tugas untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang diantaranya adalah Rancangan Perda tentang RPJMD dan dokumen RKPD.

Saat ini, penyusunan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2026 sehingga dokumen ini belum dapat menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Penyusunan RKPD Tahun 2026 masih merujuk pada RPD Tahun 2024-2026. Proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda

Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali 2026 disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

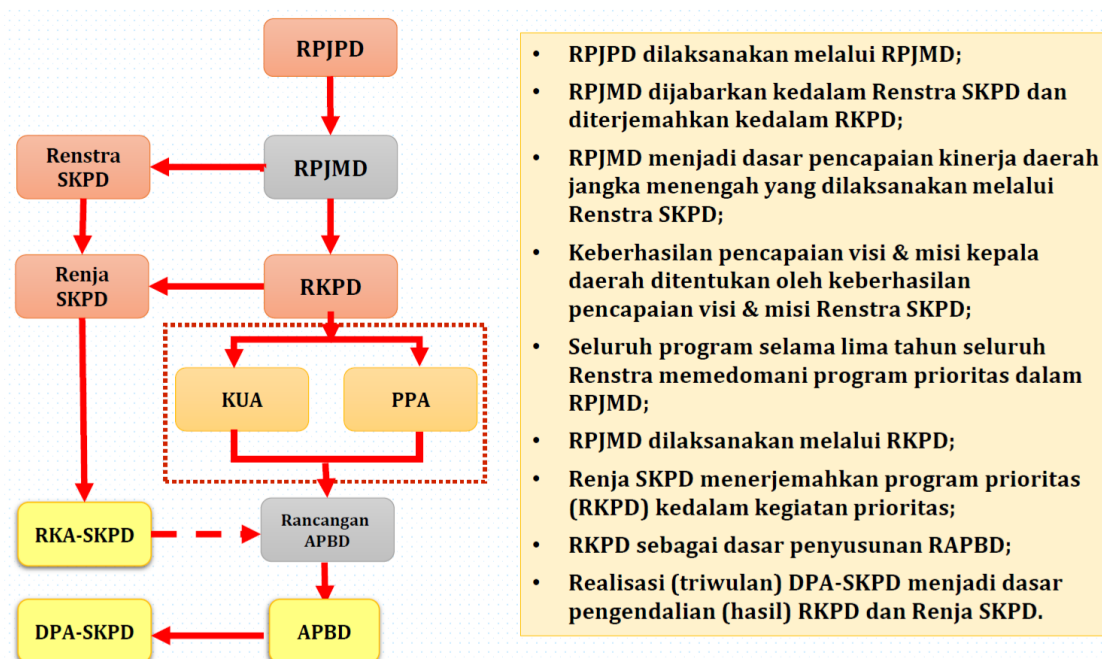
Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026

Sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

3. RKPD merupakan acuan bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Tahun 2026 adalah sebagai penjabaran RPD Tahun 2024-2026), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 untuk periode satu tahun, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2026, telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Selain

itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM, baik isu strategis daerah maupun nasional. Koperasi dan UKM di Provinsi Bali memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan terhadap ekonomi di Provinsi Bali. Kondisi ini ditunjukkan melalui perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Bali yang terus mengalami peningkatan. Di Tahun 2024 total jumlah Koperasi di Provinsi Bali yaitu 5.561 koperasi, total anggota 923.408 orang anggota, total volume usaha Rp30.595.568.665.543, total aset Rp30.158.085.369.062. Sementara jumlah UKM di tahun 2024 berjumlah 448.434 UKM.

Potensi koperasi dan UKM tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Provinsi Bali. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya Koperasi dan UKM tersebut akan berdampak pada perekonomian Provinsi Bali, dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melihat potensi besarnya jumlah Koperasi dan UKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan dalam rangka pengembangan ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, yang dapat mempromosikan kerjasama antar anggota komunitas dan meningkatkan akses ke barang dan jasa tingkat lokal. Koperasi dan UKM sering kali menjadi pusat inovasi dan kreativitas dan cenderung lebih fleksibel dalam menciptakan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang dan ekonomi menjadi lebih beragam karena tidak terlalu bergantung pada beberapa sektor utama dan hal ini membuat perekonomian lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar dan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan kepada kelompok yang kurang terwakili dalam ekonomi formal, seperti wanita, orang cacat, atau masyarakat adat.

Selain itu, dengan pernah terjadinya pandemic covid-19 yang sangat berpengaruh pada terpuruknya perekonomian Bali pada saat itu, menjadi bahan referensi untuk melakukan perubahan-perubahan pada masyarakat sehingga juga berdampak pada perubahan pola bisnis pada koperasi dan UKM. Strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi pada hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UKM. Sehingga baik

Koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, fokus pada peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan UKM.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2045(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan

16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD maka maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 adalah dokumen yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam pembangunan daerah;
- 3) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja;
- 4) Menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi: 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan

dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam Bab II tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi:

1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; 2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan tugas urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap dinyatakan sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- a. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain:
- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;
 - Melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data per Desember 2024, komposisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah:

Tabel 2.1
Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	13
3	Strata 1	35
4	Diploma III	4
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	4
7	SLTP / Sederajat	1
8	SD	-
Total		58

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (Desember 2024)

Jumlah pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang laki-laki dan 26 (dua puluh enam) orang perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menggambarkan tingkat pendidikan Pegawai ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didominasi oleh Strata 1(satu) 60,34%, strata 2 (dua) 22,41%, Strata 3 (tiga) 1,72%, Diploma 6,90%, SMA 6,90%, serta SLTP 1,72%. Jumlah pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan XI (PPPK)	1
2	Golongan IX (PPPK)	1
3	Golongan VII (PPPK)	1
4	Golongan IV	11
5	Golongan III	38
6	Golongan II	6
7	Golongan I	-
Total		58

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (Desember 2024)

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa Golongan III mendominasi ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sejumlah 65,52%, Golongan IV 18,97%, Golongan II 10,34%.

Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional maka komposisi ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bali Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
JABATAN STRUKTURAL		
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	4
JABATAN FUNGSIONAL		
1	Pengawas Koperasi	9
2	Pengembang Kewirausahaan	2
3	Pranata Komputer	1
Total		23

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (Desember 2024)

Dari tabel 2.3 menggambarkan bahwa seluruh Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sudah terisi, sementara Jabatan Fungsional sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Jumlah Pegawai Non ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebanyak 69 (enam puluh sembilan) seperti ditunjukkan pada tabel 2.4:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Administrasi	42
2.	Sopir	8
3.	Tenaga Teknis/Lapangan	-
4.	Penjaga Malam	8
5.	<i>Cleaning Service</i> dan Tukang Kebun	11
Total		69

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (Desember 2024)

Berdasarkan tabel 2.4 jumlah pegawai Non ASN sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang perempuan dan 44 (empat puluh empat) laki-laki, sangat membantu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, mengingat didominasi dari generasi milenial penting bagi organisasi untuk memahami dan menghargai peran yang dimainkan oleh generasi millennial dalam lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan kekuatan dan karakteristik mereka, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan relevansi mereka dalam era yang terus berubah dengan cepat membawa perspektif unik, keterampilan, dan nilai-nilai ke tempat kerja yang dapat memengaruhi budaya dan produktivitas organisasi.

Sedangkan kondisi aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali seperti ditunjukkan pada tabel 2.5:

Tabel 2.5
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No	Golongan	Total		Keterangan
		Jumlah	Satuan	
1	Tanah	6.345	M ²	Sudah diserahkan
2	Bangunan Gedung	4	Unit	Kondisi Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10	Unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan Operasional Roda 2	13	Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	119	Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	86	Unit	Kondisi Baik
7	Komputer	31	Unit	Kondisi Baik
8	Printer	24	Unit	Kondisi Baik
9	Filling Cabinet	29	Unit	Kondisi Baik
10	Rak Kaca/Kayu	23	Unit	Kondisi Baik
11	Lemari Besi/Kayu	24	Unit	Kondisi Baik
12	AC	69	Unit	Kondisi Baik
13	Zice	9	Unit	Kondisi Baik
14	Kursi Tamu	12	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	Kondisi Baik

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2024)

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Dengan memahami peran aset dinas dalam organisasi dan mengelolanya dengan baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kepatuhan serta keamanan. Ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2026 Provinsi Bali dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun kelima akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI					17.166.732.546		15.162.882.072			
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	Nilai	15.758.693.861	82,71 Nilai	13.955.406.701,75		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	3	Dokumen	128.914.020	3 Dokumen	80.593.317		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	122.914.420	2 Dokumen	121.098.720		
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	5.999.600	1 Laporan	5.615.750		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	1	Dokumen	12.285.642.851	1 dokumen	10.801.409.908		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67	Orang/ Bulan	12.285.642.851	67 Orang	10.801.409.908		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diterbitkan	1	Dokumen	20.000.000	-	-		
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4	Orang	20.000.000	-	-		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang diproses	2	Dokumen	222.163.400	2 dokumen	176.492.568		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	10.613.000	1 Paket	9.729.000		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	84.580.500	1 Paket	66.602.200		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.000.000	1 Paket	54.200.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	12.187.700	1 Paket	7.776.250		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1	Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	55.893.000	1 Laporan	31.726.668		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Dokumen	721.538.450	1 Dokumen	615.903.541,69		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	Unit	721.538.450	31 Unit	615.903.541,69		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	Dokumen	1.140.908.600	2 Dokumen	1.029.864.405		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.992.000	1 Laporan	1.660.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	259.000.000	1 Laporan	189.026.790		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	879.916.600	1 Laporan	839.177.615		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2	Dokumen	1.239.526.540	2 Dokumen	1.205.021.809,06		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	Unit	776.574.980	21 Unit	755.227.380		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	76	Unit	50.000.000	76 Unit	40.920.000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	412.951.560	4 Unit	408.874.429,06		
2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3	Persen	238.410.7000	6,15 persen	148.079.420		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	10	Unit	218.410.700	10 Unit	142.787.420		
				Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10	Unit	218.410.700	10 Unit	142.787.420		
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1	Unit	20.000.000	1 Unit	5.292.0000		
				Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi	1	unit	20.000.000	1 unit	5.292.000		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	7	Persen	150.906.620	8,06 persen	127.986.135		
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	47	Unit	49.999.500	218 Unit	38.267.910		
				Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	47	Unit	49.999.500	218 Unit	38.267.910		
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	45	Unit	100.909.120	86 Unit	89.718.225		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	45	Unit	100.909.120	86 Unit	89.718.225		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,2	Persen	198.408.880	3,87 persen	175.150.930		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	76	unit usaha	198.408.880	146 unit usaha	175.150.930		
				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	76	unit usaha	148.408.980	76 unit usaha	131.343.780		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	70	unit usaha	49.999.900	70 unit usaha	43.807.150		
6				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	6	Persen	989.684.630	6 Persen	925.679.759		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	225	unit usaha	989.684.630	221 unit usaha	925.679.759		
				Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	225	Unit usaha	939.685.130	140 unit usaha	875.991.259		
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100	orang	49.999.500	81 orang	49.688.500		
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI						4.376.912.578		4.215.375.168		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	Nilai	423.149.980	82,71 Nilai	375.868.514		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Dokumen	39.891.700	2 Dokumen	38.949.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	665.800	1 Paket	605.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.725.900	1 Paket	2.269.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	32.500.000	1 Paket	32.500.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000	1 Paket	650.000		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	1.000.000	1 Laporan	650.000		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.980.000		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Dokumen	207.690.060	2 Dokumen	169.125.794		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.000.000	1 Laporan	830.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	48.500.000	1 Laporan	14.187.234		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	158.190.060	1 Laporan	154.108.560		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2	Dokumen	175.568.220	2 Dokumen	167.793.720		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	94.007.140	1 unit	87.347.440		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	1.990.000	5 Unit	1.850.000		

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	79.571.080	3 Unit	78.596.280		
2				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25	Persen	8.009.040.280	25 persen	7.688.724.592		
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2033	Orang	8.009.040.280	1742 orang	7.688.724.592		
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	2033	Orang	8.009.040.280	1742 orang	7.688.724.592		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan terhadap berbagai aspek dalam penyediaan layanan publik oleh suatu perangkat daerah yang mencakup evaluasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan dampak dari layanan yang diberikan. Analisis Kinerja ini berdasarkan atas laporan Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 yang didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2024, dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan *outcome* yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp26.251.229.311,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp23.791.258.861,75,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) atau 90,63% sedangkan realisasi fisik sebesar 99,81%. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.7 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategi		Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1		2	3	4	5	6	7	8
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	-%	-%	-%	8,00%	19,61%	245%
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	2,90%	3,50%	120%	3,00%	3,66%	122%

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 sudah sangat baik. Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2024 “Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi” adalah 19,61% dari target sebesar 8,00% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 245%. Peningkatan volume usaha koperasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan anggotanya. Semakin besar volume usaha yang dijalankan, semakin banyak pula manfaat yang bisa diperoleh oleh koperasi, seperti peningkatan pendapatan, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, serta memperluas jaringan usaha. Hal ini akan memperkuat posisi koperasi di pasar, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Dengan peningkatan volume usaha, koperasi juga dapat memperbesar cadangan modal yang bisa digunakan untuk pengembangan lebih lanjut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Untuk mencapai peningkatan volume koperasi, ada beberapa Langkah yang bisa diambil antara lain: pertama, koperasi perlu memperluas jangkauan pasar dengan melakukan inovasi produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat. Kedua, koperasi harus mengoptimalkan manajemen dan sistem operasionalnya, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah transaksi

dan komunikasi. Ketiga, koperasi bisa menjalin kemitraan strategis dengan pihak lain untuk memperbesar volume usaha. Selain itu, edukasi dan pelatihan kepada anggota koperasi juga sangat penting agar mereka lebih terampil dalam mengelola usaha dan dapat berkontribusi secara maksimal.

Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dengan indikator Rasio Kewirausahaan, target tahun 2024 adalah 3% dengan realisasi 3,66% dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam meningkatkan Rasio wirausaha sehingga usaha UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan adalah:

1. Transformasi pertumbuhan wirausaha produktif dengan membina setiap orang yang memiliki jiwa dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dalam membentuk struktur usaha yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital seperti *marketplace*, *e-commerce* atau *platform* digital lainnya.
3. Transformasi usaha informal ke formal dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh izin usaha yang lengkap, memiliki sertifikasi dan standardisasi usaha, dan dapat mengakses pembiayaan formal.

Tabel 2.9 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A	8,00	N/A	N/A	N/A	N/A	19,61
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	2,90	3,00	N/A	N/A	N/A	3,50	3,66

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 5 (lima) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2024. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**. Data-data yang kosong merupakan bentuk penyesuaian indikator hasil *review* SAKIP, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian indikator kinerja pertahunnya. Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional, fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang relevan (*off taker/buyer*), dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.
- b. Peningkatan Produktivitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi, Pembentukan Koperasi Produksi, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi serta Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha.
- c. Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga inkubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM.

Tabel 2.10 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR 2026	CAPAIAN	Tingkat Kemajuan
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	19,61	24,00	82%	Mendekati Target
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3,66	3,5	104%	Melebihi Target

Dari tabel di atas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026. Dapat diketahui bahwa Pencapaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi sudah mendekati target akhir Renstra dikarenakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi dengan melaksanakan program-program pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota koperasi dalam manajemen usaha, pemasaran produk, serta pengelolaan keuangan. Pencapaian Indikator Rasio Kewirausahaan juga sudah melebihi target, capaian itu dicapai berkat langkah-langkah yang diambil antara lain menyediakan pelatihan kewirausahaan, memberikan akses kepada informasi dan teknologi terkini, serta memfasilitasi pertemuan antara calon pengusaha dengan investor atau mitra bisnis. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali juga mengembangkan program inkubasi bisnis dan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha serta akses pembiayaan yang terjangkau.

Tabel 2.11 Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	8,00	19,61	245%	Peningkatan Peningkatan volume usaha Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, fasilitasi dalam hal perizinan, pembiayaan, serta pelatihan dan pendampingan bagi pengurus dan anggota koperasi dalam hal manajerial, pemasaran, dan pengelolaan keuangan	Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, koperasi akan lebih mampu mengelola usaha mereka dengan baik dan meningkatkan volume usaha
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3,00	3,66	122%	Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan,	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
						peningkatan kapasitas lembaga inkubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM	

Tabel 2.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	8,00	64,99	812%	587.728.200	451.216.485	77	23%
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	3,00	3,66	122%	9.481.657.270	9.008.767.161	95	5%

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 2.13 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	812	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	100%	Menunjang

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	koperasi yang professional dan akuntabel			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	10 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Satu Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10 Unit	Menunjang
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu	1 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	1 Unit	Menunjang
				Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi		
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	218 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	218 Unit	Menunjang

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	86 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	86 Unit	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	100%	Menunjang
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	146 Kop	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	76 Kop	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	70 Kop	Menunjang

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	120	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	100%	Menunjang
				<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1742 Org	Menunjang
				Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	1742 Org	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	100%	Menunjang
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	195 UMKM	Menunjang
				Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	195 UMKM	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	100%	Menunjang
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	417 Unit	Menunjang

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	317 Unit	

Pencapaian Tujuan dan indikator tujuan tentunya juga didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

a. Peningkatan Volume Usaha Koperasi

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian nasional. Agar berfungsi secara optimal sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian, koperasi harus dikelola secara efisien dan produktif. Tingkat produktivitas koperasi, peningkatan efisiensi murni harus diprioritaskan, diikuti dengan peningkatan efisiensi skala dan efisiensi teknis. Koperasi harus memberikan pelatihan reguler untuk staf mereka, manajemen profesional, mengadopsi teknologi canggih, dan memperbesar ukurannya dengan menggabungkan koperasi kecil menjadi entitas yang lebih besar.

Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2024-2026) yang mendukung pada sasaran strategis kesatu adalah:

1. Persentase Koperasi yang difasilitasi IUSP. Target kinerja ini di tahun 2024 adalah 3,00% dengan Capaian 100%
2. Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta. Target kinerja ini di tahun 2024 adalah 3,2% dengan capaian 100%
3. Persentase Koperasi Berkualitas. Target kinerja ini tahun 2024 adalah 7,00% dengan realisasi 100%

b. Rasio Kewirausahaan

Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan

dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat.

Capaian sasaran strategis kedua pada tabel 2.13 dapat ditunjukkan pada tahun 2024 target 3,00% dengan capaiannya adalah 122% dan termasuk pada kategori Baik, jika dibandingkan dengan tahun 2023. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2024-2026) yang mendukung pada sasaran strategis kedua adalah:

1. Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi. Target kinerja ini di tahun 2024 adalah 25% dengan capaian 100%.
2. Persentase pertumbuhan wirausaha. Target kinerja ini di tahun 2024 adalah 6,00% dengan capaian 100%.
3. Persentase UMKM Naik Kelas. Target Kinerja ini di tahun 2024 adalah 3,00% dengan capaian 100%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2024, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp26.251.229.311 (Dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	238.410.700	148.079.420	62,11%
a	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.410.700	142.787.420	65,38%
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.410.700	142.787.420	65,38%
b	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	5.292.000	26,46%

NO	Program/Kegiatan/Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	5.292.000	26,46%
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.908.620	127.986.135	84,81%
a	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.500	38.267.910	76,54%
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	49.999.500	38.267.910	76,54%
b	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.909.120	89.718.225	88,91%
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.909.120	89.718.225,00	88,91%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	198.408.880	175.150.930	88,28%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	198.408.880	175.150.930	88,28%
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980	131.343.780	88,50%
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.900	43.807.150,00	87,61%
4	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	989.684.630	925.679.759	93,53%
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan	989.684.630	925.679.759	93,53%

NO	Program/Kegiatan/Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	939.685.130	875.991.259,00	93,22%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	482.932.360,00	394.362.810,00	81,66%
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	482.932.360,00	394.362.810,00	81,66%
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	219.328.560	218.261.060	99,51%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	263.603.800	176.101.750	66,81%
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	8.009.040.280	7.688.724.592	96,00%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.009.040.280	7.688.724.592	96,00%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	8.009.040.280	7.688.724.592	96,00%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.181.843.841	14.331.275.216	88,56%
a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.415.094.760	1.372.815.529	97,01%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	870.582.120	842.574.820	96,78%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.990.000	42.770.000	82,27%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.522.640	487.470.709	98,97%

NO	Program/Kegiatan/Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
b	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.914.020	126.714.470	98,29%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.914.420	121.098.720	98,52%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.600	5.615.750	93,60%
c	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.285.642.851	10.801.409.908	87,92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.285.642.851	10.801.409.908	87,92%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	0	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	0	0,00%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.055.100	215.441.568	82,21%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.893.000	33.706.668	58,22%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.278.800	10.334.000	91,62%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.306.400	68.871.200	78,88%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	86.700.000	99,09%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.576.900	10.384.700	82,57%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000	5.445.000	99,00%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	721.538.450	615.903.542	85,36%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721.538.450	615.903.542	85,36%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.348.598.660	1.198.990.199	88,91%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.000	2.490.000	83,22%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.500.000	203.214.024	66,09%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.038.106.660	993.286.175	95,68%

Realisasi anggaran pada tahun 2024 pada 7 program tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sudah BAIK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, selama ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah melaksanakan tugas dengan baik dan memanfaatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada, tetapi bukan berarti dalam

pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan suatu kendala ataupun permasalahan, ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi :

- a. Kelembagaan;
- b. Pembiayaan;
- c. Kualitas SDM;
- d. Produksi dan Pemasaran;
- e. Validasi data KUMKM.

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain:

- a. Belum lengkapnya legalitas usaha dan kurangnya keterampilan manajerial pengelola Koperasi dan pelaku UMKM;
- b. Keterbatasan akses permodalan dan layanan keuangan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan usaha Koperasi dan UMKM;
- c. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengelola Koperasi dan pelaku UMKM dapat membatasi kemampuan individu untuk memulai dan mengelola bisnis;
- d. Keterbatasan adopsi teknologi dan inovasi dapat membuat Koperasi dan UMKM ketinggalan dalam persaingan;
- e. Belum terpetakannya data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan akuntabel.

2.4 Review terhadap RKPD

Penyusun Renja dilakukan *review* RKPD. Dengan melakukan *review* terhadap RKPD dengan memperhatikan poin-poin di atas, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan tersebut, serta memberikan masukan yang berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas implementasi program-program pembangunan daerah. Dalam *review* terhadap RKPD diuraikan sebagai berikut: proses dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2024 dan kebutuhan tahun 2026. Alasan proses tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan telah

sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali Tahun 2026, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda (Lampiran 2 Tabel 2.8).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Perangkat Daerah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025, ada beberapa usulan masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut:

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis dimasukkan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2.15
Usulan Program/Kegiatan Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi Bali

No	Usulan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diharapkan memberikan intervensi terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota se-Bali. Melalui intervensi diharapkan dapat memberikan semangat bagi pelaku KUMKM untuk melakukan digitalisasi dan meningkatkan volume usaha sehingga Provinsi Bali mampu mencapai target dan sasaran yang ditetapkan	-	-	-	-
2.	Penyediaan <i>database</i> KUMKM yang baik				
3.	Potensi lokal Bali dalam 5 (lima) tahun kedepan harus dipetakan dan dibuatkan <i>database</i> yang digunakan sebagai sumber pembuatan arah kebijakan kedepannya				
4.	Program kerja pemerintah dalam hal akselerasi dgitalisasi Koperasi dan UMKM Bali di Tahun 2025-2026				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional serta prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sehingga ada keterpaduan antara prioritas pembangunan Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjawab dengan program unggulan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tujuan Pembangunan Daerah beserta program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM. Serta Kewirausahaan sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Bali dan Rasio Kewirausahaan di Bali.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Profesionalisme Koperasi
Indikator : Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas Usaha UMKM
Indikator : Persentase UMKM formal

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dikembangkan untuk mencapai 2 (dua) sasaran tersebut. Adapun Program/Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program/kegiatan dan Sub Kegiatan dengan menyesuaikan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2.	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
III.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
IV.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
b.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
V.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
a.	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
VI.	Program Pengembangan UMKM
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah
a.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
c.	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
d.	Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
VII.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	JUMLAH PROGRAM: 7
	JUMLAH KEGIATAN: 14
	JUMLAH SUB KEGIATAN: 29

Berdasarkan tabel di atas Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 berjumlah 7 (tujuh) terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas dan 1 (satu) program rutin, kegiatan berjumlah 14 (empat belas), dan sub kegiatan berjumlah 29 (dua puluh sembilan).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2026 dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp33.435.319.239 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah). Adapun skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan Pagu Anggaran sebagaimana tabel berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRETARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRETARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	25.286.252.235	3.142.362.288	2.468.704.716	388.000.000	2.150.000.000	33.435.319.239

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu yang telah ditetapkan sampai pada tahap penetapan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026 dan ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak mendapat alokasi pendanaan akan diadakan penyesuaian terhadap target yang pada saat penyusunan berdasarkan pagu indikatif dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yang menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026.
- c. Partisipasi masyarakat dalam hal ini pelaku Koperasi dan UKM serta *stakeholder* (asosiasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan) dalam proses penyusunan program dan kegiatan melalui Forum Penyelenggaraan Perangkat Daerah ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pelaku Koperasi dan UKM.
- d. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang

pendanaannya bersumber dari APBD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026 antara lain:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat 7 (tujuh) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp33.435.319.239 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Lampiran 1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 202	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						29.874.417.155,00							39.747.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.874.417.155,00							39.747.500.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						29.874.417.155,00							39.747.500.000,00	
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-				28.443.951.711,00						-	36.197.500.000,00	-
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.15	82.71	0	82.75	28.443.951.711,00	-	-	-	-	-	-		-
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	163.135.604,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan	-	180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	148.135.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25.286.252.235			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		30.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/Bulan	25.286.252.235	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		30.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Dokumen	602.500.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, menge	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		385.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											mbangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi					
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	310.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											melalui peran aktif koperasi					
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		130.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		30.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		10.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	120.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		130.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	100.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BMD		800.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BMD		800.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	831.797.904			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.357.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi					
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		7.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	246.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		350.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											melalui peran aktif koperasi					
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	580.797.904	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				2 Dokumen	1.460.265.968			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		3.475.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											peran aktif koperasi					
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	900.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		1.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				113 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		175.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	410.265.968	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		2.300.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						280.132.984							500.000.00	
		[Meningkatkan Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam]	<i>Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha</i>	10.99	4.99	3.70	6.99	280.132.984							500.000.00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>				12 Unit Usaha	230.132.984			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		350.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				12 Unit Usaha	230.132.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		350.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan				1 Unit Usaha	50.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan;	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

			<i>Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>								kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata				
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						200.000.000							300.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi]	<i>Persentase koperasi sehat</i>	25.00	17.81	0	21.00	200.000.000							300.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi</i>				95 Unit Usaha	100.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				95 Unit Usaha	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Per	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata				
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi				75 Unit Usaha	100.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				75 Unit Usaha	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											peran aktif koperasi					
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						200.000.000							700.000.000	
		[Meningkatkan Produktivitas Koperasi]	Persentase koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swast	48.95	34.68	0	40.95	200.000.000							700.000.000	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				175 Unit Usaha	200.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta		700.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan				90 Unit Usaha	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, meng	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi;	Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta		300.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

			Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata				
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				50 Unit Usaha	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP- Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta		400.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						370.199.476							1.200.000.000	
		[Meningkatkan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri]	Persentase pertumbuhan kewirausahaa n	1.46	1.26	0	1.30	370.199.476							1.200.000.000	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan				210 Unit Usaha	370.199.476			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan;	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha		1.200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata				
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				100 Unit Usaha	270.199.476	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha		1.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				100 Orang	100.000.000,	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha		200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											sentra produksi melalui peran aktif koperasi					
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						380.132.984							850.000.000	
		[Meningkatnya Daya Saing UMKM]	Persentase UMKM naik kelas	3.20	3.00	0	3.04	380.132.984			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha		850.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	230.132.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha		350.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

											industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi					
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>				35 Orang	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha		200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			<i>Wirausaha yang Difasilitasi</i>				100 Orang	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha		150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

[illegible]

1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						635.566.492							758.500.000	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.15	82.71	82.38	82.75	635.566.492							758.500.000	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Dokumen	89.000.000			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		106.500.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.500.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		16.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		70.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		2.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		2.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		15.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	251.500.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		267.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		2.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		55.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas,	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		210.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	295.066.492			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		385.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	110.066.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		175.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											mengemban agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		50.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi</i>				1 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		160.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						2.619.835.592							8.200.000.000	
		[Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian]	Persentase pengelola KUMKM yang berkompeten	34.75	25.00	25.00	18.75	2.619.835.592							8.200.000.000	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				420 Orang	2.619.835.592			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pengelola Koperasi dan UMKM		8.200.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				420 Orang	2.619.835.592			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta	Pengelola Koperasi dan UMKM		8.200.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata				
		UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						305.500.000,0							399.500.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						305.500.000,0							399.500.000	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						305.500.000,0							399.500.000	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						305.500.000							399.500.000	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.15	82.71	82.38	82.75	399.500.000							399.500.000	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Dokumen	89.000.000			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		112.500.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.500.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		17.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		75.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		2.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		2.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		15.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

[illegible]

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		75.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		25.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	145.000.000			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mende	Tata Kelola Pemerinta h an dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		185.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

											mbangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		80.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengemba	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		30.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

										ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD		75.000.000	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
JUMLAH								33.435.319.239							49.105.500.000	

Lampiran 2

Tabel 2.8 Review terhadap RKPD Provinsi Bali Tahun 2026

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali				29.874.417.155					39.747.500.000	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,75 Nilai	28.443.951.711	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82,75 Nilai	28.443.951.711	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	163.135.604	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	163.135.604	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	148.135.604	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	148.135.604	
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	15.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kelurahan/ Desa									
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	25.286.252.235	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	25.286.252.235	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 orang/ bulan	25.286.252.235	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan / Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 orang/bulan	25.286.252.235	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	602.500.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	602.500.000	
a.	Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	310.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	310.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	125.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	125.000.000	
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.000.000	
e.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	7.500.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	7.500.000	
f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	120.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	120.000.000	
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	100.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	100.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	100.000.000	
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	831.797.904	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	831.797.904	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	5.000.000	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	246.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	246.000.000	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	580.797.904	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan / Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	580.797.904	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	1.460.265.968	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	1.460.265.968	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit	900.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan / Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit	900.000.000	
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	113 unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan / Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	113 unit	150.000.000	
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	410.265.968	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan / Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	410.265.968	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha	6,99	280.132.984	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha	6,99	280.132.984	
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	12 unit usaha	230.132.984	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	12 unit usaha	230.132.984	
a.	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	12 unit usaha	230.132.984	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	12 unit usaha	230.132.984	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperai dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	1 unit uaha	50.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperai dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	1 unit uaha	50.000.000	
a.	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	1 unit usaha	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	1 unit usaha	50.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
C.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi sehat	21.00	200.000.000	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi sehat	21.00	200.000.000	
1.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaan nya lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	95 unit usaha	100.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaan nya lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	95 unit usaha	100.000.000	
a.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	95 unit usaha	100.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	95 unit usaha	100.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		Jumlah Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diperiksa dan diawasi	75 unit usaha	100.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		Jumlah Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diperiksa dan diawasi	75 unit usaha	100.000.000	
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	75 unit usaha	100.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	75 unit usaha	100.000.000	
D.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	40.95	200.000.000	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	40.95	200.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi, KSP/USP- Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175 unit usaha	200.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi, KSP/USP- Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175 unit usaha	200.000.000	
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi, KSP/USP- Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	90 unit usaha	150.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi, KSP/USP- Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	90 unit usaha	150.000.000	
b.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi, KSP/USP- Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta	Koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/lota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberdayakan	90 unit usaha	50.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi, KSP/USP- Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta	Koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/lota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberdayakan	90 unit usaha	50.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
E.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase pertumbuhan wirausaha	1,30	370.199.476	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase pertumbuhan wirausaha	6,00%	370.199.476	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Usaha kecil yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	210 unit usaha	370.199.476	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Usaha kecil yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	210 unit usaha	370.199.476	
a.	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah unit usaha UMKM yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan	100 unit usaha	270.199.476	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah unit usaha UMKM yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan	100 unit usaha	270.199.476	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		pengentasan kemiskinan			Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		pengentasan kemiskinan			
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	100 orang	100.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	100 orang	100.000.000	
F.	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Naik Kelas	3,00 Persen	380.132.984	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Naik Kelas	3,00 Persen	380.132.984	
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	165 unit uaha	380.132.984	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	165 unit uaha	380.132.984	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	230.132.984	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	230.132.984	
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	35 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	35 Orang	50.000.000	
c.	Sub Kegiatan Penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Wirausaha yang Difasilitasi	100 orang	50.000.000	Sub Kegiatan Penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Wirausaha yang Difasilitasi	100 orang	50.000.000	
d.	Sub Kegiatan Fasilitas inkubator usaha kecil	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	10 unit usaha	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas inkubator usaha kecil	Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	10 unit usaha	50.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				3.255.402.084	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				3.255.402.084	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.75 Nilai	635.566.492	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.75 Nilai	635.566.492	
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	89.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	89.000.000	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota / Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1.000.000	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
c.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.500.000	
e.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	10.000.000	
f.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.500.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.500.000	
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	251.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	251.500.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.500.000	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	50.000.000	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	200.000.000	
3.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	295.066.492	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	295.066.492	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	110.066.492	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	110.066.492	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Operasional / Lapangan		dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan		dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	35.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	35.000.000	
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	150.000.000	
B.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM yang berkompeten	18,75	2.619.835.592	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM yang berkompeten	18,75	2.619.835.592	
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut pendidikan dan latihan perkoperasian	420 orang	2.619.835.592	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut pendidikan dan latihan perkoperasian	420 orang	2.619.835.592	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	420 orang	2.619.835.592	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	420 orang	2.619.835.592	
	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				305.500.000					305.500.000	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.75 Nilai	305.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.75 Nilai	305.500.000	
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	89.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	89.000.000	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota / Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.500.000	
e.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	10.000.000	
f.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.500.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.500.000	
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan	2 dokumen	71.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan	2 dokumen	71.500.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pemerintahan daerah					pemerintahan daerah			
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.500.000	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	50.000.000	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	200.000.000	
3.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	145.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	145.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	70.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	70.000.000	
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	25.000.000	
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000	
JUMLAH					33.435.319.239					33.435.319.239	